

Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan Hukum Secara Gratis Menggunakan Metode Saw Pada LBH Cita Keadilan Watansoppeng

Sumarni^{*1}, Andi Patappari²

^{1,2} Program Studi Sistem Informasi, Universitas Lamappapoleonro

^{1,2}Jl. Kesatria No.60 Watansoppeng, Soppeng Sulawesi Selatan

Email: ^{*}1sumarniunipol@gmail.com, ²andi.patappari@unipol.ac.id

(Naskah masuk: 12-05-2025, direvisi: 21-05-2025, diterbitkan: 29-05-2025)

Abstrak

Kendala yang dihadapi oleh LBH Cita Keadilan Watansoppeng adalah kesulitan dalam memutuskan siapa yang layak menerima bantuan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sering terjadi kekeliruan dalam memutuskan hak pemberian bantuan hukum bagi masyarakat Kabupaten Soppeng, yang disebabkan oleh sistem yang digunakan dan pengimputan data yang masih manual. Proses ini mengharuskan pemeriksaan berkas satu per satu, sehingga memerlukan waktu yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk dibuat Untuk membuat aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan Hukum Secara Gratis Menggunakan Metode SAW Pada LBH Cita Keadilan Watansoppeng sebagai alat bantu untuk mempermudah LBH Cita dalam menentukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan metode SAW. Metode SAW dipilih karena *Simple Additive Weighting* menggunakan teknik pemeringkatan atau evaluasi berdasarkan bobot atau nilai relatif dari kriteria yang diberikan. Dengan adanya sistem pendukung keputusan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* ini dapat membantu pihak LBH Cita Keadilan Watansoppeng dalam memutuskan siapa saja warga Kabupaten Soppeng yang berhak menerima bantuan hukum sesuai undang undang bantuan hukum Republik Indonesia.

Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Pemberian Bantuan Hukum, Metode SAW

Abstract

The challenges faced by LBH Cita Keadilan Watansoppeng include difficulties in determining who is eligible to receive legal aid in accordance with applicable laws. Errors frequently occur in determining the right to legal aid for residents of Soppeng Regency, primarily due to the system used and the manual data entry process. This process requires the examination of each file individually, which takes a long time. This study aims to develop a free legal aid decision support system using the SAW method at LBH Cita Keadilan Watansoppeng as a tool to facilitate LBH Cita in determining the provision of legal aid to the community. This application was developed using the SAW method. The SAW method was chosen because Simple Additive Weighting employs a ranking or evaluation technique based on the relative weights or values of the given criteria. The implementation of this decision support system using the Simple Additive Weighting method can assist LBH Cita Keadilan Watansoppeng in determining which residents of Soppeng Regency are eligible to receive legal aid in accordance with the Legal Aid Law of the Republic of Indonesia.

Keywords: Decision Support System, Legal Aid, SAW Method

1. PENDAHULUAN

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan suatu lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu untuk menyewa advokat dalam menyelesaikan perkara kasus yang dihadapi (Juliana et al., 2023). Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum sebagaimana diatur pasal 1 angka 3 UU 16/2011 yang berbunyi Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang

memberi layanan Bantuan Hukum (Rohmah, 2022). Asas awal lembaga bantuan hukum di Kabupaten Soppeng ini dibentuk berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efesiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

LBH Cita Keadilan Watansoppeng adalah salah satu lembaga bantuan yang berfokus pada pemberian bantuan hukum yang berkedudukan di Jl. Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng,

Sulawesi Selatan. Didirikan oleh sekelompok pengacara yang prihatin terhadap ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat kurang mampu, LBH Cita Keadilan ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat dan sudah mengabdikan selama 20 tahun. LBH Cita Keadilan Watansoppeng sejak awal telah berkomitmen untuk mendampingi warga dalam berbagai kasus hukum, termasuk sengketa tanah, hak pekerja, kasus perdata dan pidana.

Kriteria utama untuk menerima bantuan hukum gratis pada LBH Cita Keadilan Watansoppeng meliputi beberapa aspek. Pertama, penerima harus memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh pihak berwenang, seperti kelurahan atau kecamatan, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar memerlukan bantuan karena keterbatasan ekonomi. Kedua, penerima harus memenuhi syarat usia cakap hukum, yang umumnya di Indonesia berarti telah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah. Ketiga, jenis kasus yang ditangani juga menjadi pertimbangan. Dengan adanya kriteria ini, diharapkan bantuan hukum gratis dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerimanya (Bastian Ndedo, Antar Maramba Jawa, 2024).

Namun, kendala yang dihadapi oleh LBH Cita Keadilan Watansoppeng adalah kesulitan dalam memutuskan siapa yang layak menerima bantuan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sering terjadi kekeliruan dalam memutuskan hak pemberian bantuan hukum bagi masyarakat Kabupaten Soppeng, yang disebabkan oleh sistem yang digunakan dan pengimputan data yang masih manual. Proses ini mengharuskan pemeriksaan berkas satu per satu, sehingga memerlukan waktu yang lama.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah sistem dimana pemberian bantuan hukum di LBH Cita Keadilan tepat sasaran sesuai dengan kriteria dari undang-undang tentang bantuan hukum Republik Indonesia. Sistem yang peneliti usulkan dalam mengatasi masalah tersebut adalah sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan (SPK) atau *Decision Support Systems*

(DSS) adalah sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pada situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur dimana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat (Patappari, 2024).

Namun untuk dapat menggunakan sistem pendukung keputusan maka dibutuhkan sebuah metode yang tepat agar mendapatkan hasil keputusan yang sesuai dengan hak pemberian bantuan hukum sehingga LBH Cita Keadilan Watansoppeng tidak keliru dalam memutuskan siapa yang berhak menerima bantuan hukum. Oleh karena itu, metode yang peneliti gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah metode *Simple Additive Weighting*. *Simple Additive Weighting* menggunakan teknik pemeringkatan atau evaluasi berdasarkan bobot atau nilai relatif dari kriteria yang diberikan (Patappari & Aksa, Andi Nurul, 2024). Keunggulan dari metode ini adalah mampu memberikan hasil yang akurat dan konsisten dalam menentukan prioritas alternatif berdasarkan bobot yang telah ditentukan untuk setiap kriteria (M. I. Ismail, 2022).

Dengan adanya sistem pendukung keputusan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* ini maka diharapkan dapat membantu pihak LBH Cita Keadilan Watansoppeng dalam memutuskan siapa saja warga Kabupaten Soppeng yang berhak menerima bantuan hukum sesuai undang-undang bantuan hukum Republik Indonesia.

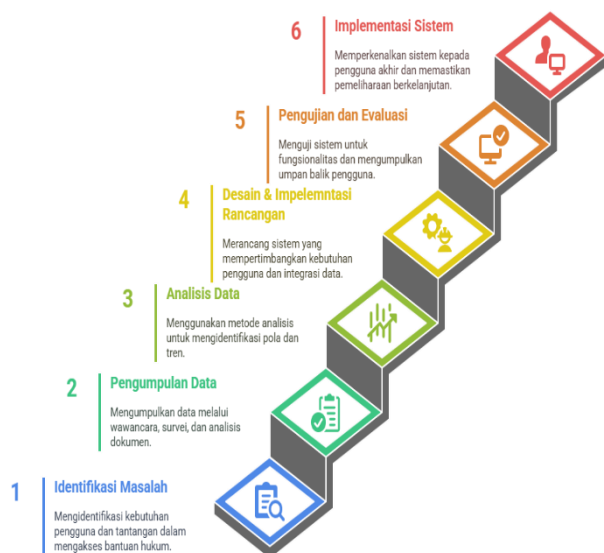
2. METODE PENELITIAN

Untuk mencapai hasil penelitian yang baik, diperlukan metode penelitian yang jelas. Adapun metode tahapan penelitian sebagai berikut:

2.1 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian sistem pendukung keputusan untuk bantuan hukum merupakan proses yang kompleks namun penting. Dengan mengikuti tahapan yang sistematis, diharapkan dapat dihasilkan sistem yang efektif dan efisien dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini tidak hanya berfokus

pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada peningkatan akses dan kualitas layanan hukum bagi mereka yang membutuhkan (Patappari, 2021).



Gambar 1. Tahapan Penelitian

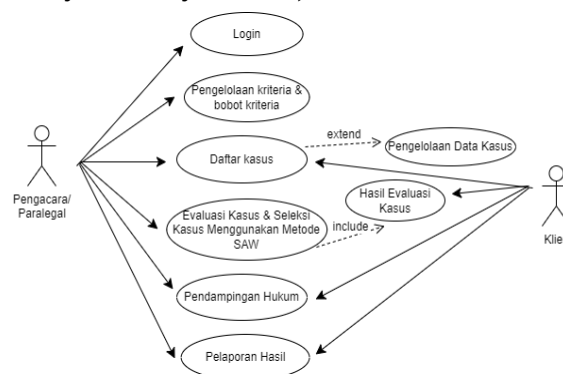
Gambar 1 merupakan tahapan-tahapan dalam proses penelitian. Berikut adalah penjelasan untuk setiap bagian yang ada pada gambar tersebut (Anggara et al., 2022):

1. **Identifikasi Masalah:** Tahap pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta tantangan yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum. Proses ini mencakup pemahaman tentang masalah yang harus diselesaikan oleh sistem.
2. **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data melalui berbagai metode seperti wawancara, survei, serta analisis dokumen untuk mendapatkan informasi yang relevan dan komprehensif.
3. **Analisis Data:** Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode statistik atau analisis lain untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat memberikan wawasan dalam pengambilan keputusan (I. Ismail & Irma, 2022).
4. **Desain & Implementasi Rancangan:** Merancang sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat mengintegrasikan data dengan baik untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat (Tahir, 2021).

5. **Pengujian dan Evaluasi:** Menguji sistem untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk evaluasi lebih lanjut.
6. **Implementasi Sistem:** Tahap akhir dimana sistem diperkenalkan kepada pengguna akhir, disertai dengan pelatihan dan dukungan untuk memastikan penggunaan yang efektif dan memastikan keberlanjutan sistem (Aksa, 2023).

2.2 Perancangan Sistem

Langkah-langkah yang dilakukan pada perancangan sistem ini adalah membuat usulan pemecahan masalah secara logika Ide usulan-usulan lainnya. Alat bantu yang digunakan adalah *Use Case* diagram. Kegunaan *Use Case* diagram ini adalah pemakai dapat dengan mudah mengerti sistem yang akan dikerjakan atau dikembangkan (Ismail Ismail, Rezky Erwin Syah, 2024).



Gambar 2. Use case Diagram sistem

Gambar diatas merupakan uses case usulan. Proses penyeleksian dilakukan mulai dari paralegal terlebih dahulu melakukan login pada sistem kemudian melakukan pengelolaan kriteria dan bobot untuk digunakan dalam evaluasi kasus, setelah itu dilanjutkan daftar kasus. Ketika login pengacara atau paralegal dapat melihat daftar kasus yang telah terdaftar di sistem. Kemudian pengelolaan data kasus, dilanjutkan proses penyeleksian kasus menggunakan perhitungan dengan metode SAW. Setelah hasil evaluasi keluar dan pendampingan hukum selesai maka pelaporan hasil kasus akan disampaikan kepada klien.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan perancangan sistem. Selanjutnya dilakukan implementasi sistem untuk mendapatkan hasil.

3.1 Implementasi Sistem

Berikut tampilan Penerapan Metode *Topsis* Pada Sistem Pendukung Keputusan sanksi hukuman pelaku pidana judi *online* anak di bawah umur pada Pengadilan Negeri Watansoppeng:

Halaman Utama



Gambar 3. Halaman Utama sistem

Gambar diatas merupakan halaman utama aplikasi. Halaman utama merupakan halaman yang digunakan untuk memanggil halaman menu lain. Pada halaman utama terdapat menu form master dan transaksi, serta menu laporan.

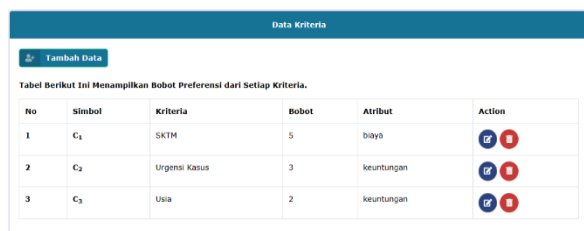
Halaman Data Alternatif



Gambar 4. Halaman Data Alternatif

Gambar diatas merupakan Halaman input Data alternatif yang digunakan untuk mengelola data alternatif seperti menginput data alternatif, dan menyimpan data alternatif.

Halaman Data Kriteria



Gambar 5. Halaman Data Kriteria

Gambar diatas merupakan Halaman data kriteria yang digunakan untuk menampilkan data kriteria yang sudah disimpan pada database.

Halaman Penilaian

Nilai Preferensi (P)		
Tabel Berikut Ini Menampilkan Nilai Preferensi (P) yang merupakan Penjumlahan dari perkalian matriks Ternormalisasi (R) dengan vektor Bobot (W).		
No	Alternatif	Hasil
1	A ₁	9
2	A ₂	8.75
3	A ₃	7.5
4	A ₄	8

Gambar 6. Halaman Penilaian

Gambar diatas merupakan Halaman hasil penilaian keputusan pemberian bantuan hukum dengan metode SAW. Pada halaman ini ditampilkan perangkungan rekomendasi pemberian bantuan hukum.

3.2 Pembahasan

Kesalahan dalam memutuskan penerima bantuan hukum sering terjadi, sebagian besar disebabkan oleh penggunaan sistem yang masih manual dan pengimputan data yang memakan waktu. Proses manual yang melibatkan pemeriksaan berkas satu per satu tidak hanya memakan waktu, tetapi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan sistem berbasis teknologi yang dapat mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Penggunaan metode SAW dalam penelitian ini dipilih karena kemampuannya untuk melakukan evaluasi dan pemeringkatan alternatif berdasarkan bobot atau nilai relatif yang diberikan pada setiap kriteria. Metode ini memungkinkan LBH Cita Keadilan untuk memberikan penilaian yang objektif dan konsisten terhadap berbagai kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menentukan penerima bantuan hukum, seperti status ekonomi, usia, dan jenis kasus hukum yang dihadapi. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan LBH dapat membuat keputusan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan undang-undang yang ada, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam proses pemberian bantuan hukum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem berbasis SAW dapat

mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurangi kesalahan manusia, dan mempermudah pengelolaan data. Dengan adanya sistem ini, LBH Cita Keadilan dapat melakukan evaluasi dengan lebih tepat dan akurat, sehingga bantuan hukum dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penulis juga mengharapkan bahwa sistem ini dapat diterapkan di lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya, sehingga proses pemberian bantuan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teknologi dalam sektor hukum, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan bantuan hukum di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk membantu LBH Cita Keadilan Watansoppeng dalam menentukan penerima bantuan hukum gratis yang tepat. Sistem ini diciptakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh LBH, seperti kesulitan dalam memutuskan siapa yang berhak menerima bantuan hukum akibat sistem manual yang masih digunakan. Penggunaan metode SAW memungkinkan sistem untuk memberikan evaluasi yang objektif dan konsisten berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan, seperti status ekonomi, usia, dan jenis kasus hukum. Dengan adanya sistem ini, LBH dapat membuat keputusan dengan lebih akurat dan tepat sasaran, mengurangi kesalahan manusia, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan sistem berbasis SAW dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan hukum, sehingga diharapkan dapat diterapkan di lembaga-lembaga bantuan hukum lain di Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan kualitas layanan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar LBH Cita Keadilan Watansoppeng terus mengembangkan dan memelihara sistem yang telah dibuat untuk memastikan keberlanjutan dan adaptasi sistem sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang. Penggunaan sistem berbasis

teknologi seperti ini sebaiknya diperkenalkan lebih luas kepada lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya, baik di tingkat lokal maupun nasional, guna menciptakan standar baru dalam pemberian bantuan hukum yang efisien dan transparan. Selain itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menguji efektivitas sistem ini dalam konteks yang lebih luas, serta memperbarui dan menyempurnakan metode evaluasi dan kriteria yang digunakan, agar dapat mengakomodasi perkembangan kebijakan hukum yang terus berubah. Diharapkan dengan adanya peningkatan teknologi dalam sektor hukum, akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu dapat lebih merata dan tepat sasaran.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, A. N. (2023). Perancangan Aplikasi Administrasi Instalasi Gawat Darurat Pada Rumah Sakit Latemmamala Kabupaten Soppeng. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknik Informatika (JISTI)*, 6(1), 43–51.
- Anggara, E. D., Widjaja, A., & Suteja, B. R. (2022). Prediksi Kinerja Pegawai sebagai Rekomendasi Kenaikan Golongan dengan Metode Decision Tree dan Regresi Logistik. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 8(1), 218–234. <https://doi.org/10.28932/jutisi.v8i1.4479>
- Bastian Ndedo, Antar Maramba Jawa, M. P. A. (2024). Sistem Informasi Klasifikasi Keluarga Miskin Penerima Bantuan Hukum Menggunakan Algoritma C4 . 5. *Jurnal INOVATIF WIRA WACANA*, 3(2), 198–212.
- Ismail, I., & Irma, I. (2022). Implementasi Algoritma Multi Factor Evaluation Process Pada Seleksi Pengangkatan Aparat Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknik Informatika (JISTI)*, 5(2), 9–16. <https://doi.org/10.57093/jisti.v5i2.122>
- Ismail Ismail, Rezky Erwin Syah, M. A. T. (2024). Klasifikasi Data Mining Pada Tingkat Kepuasan Pengunjung. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknik Informatika (JISTI)*, 7(2), 270–281.
- Ismail, M. I. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Baru SMAN

- 7 Watansoppeng Menggunakan Metode Simple additive weighting. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknik Informatika "JISTI,"* 5(1), 29–36. <https://doi.org/10.32736/sisfokom.v10i2.940>
- Juliana, I. K., Hewawati, K. M., & Aristiawan, I. G. N. (2023). Peran Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin dan Marginal. *Jurnal Jis Siwirabuda*, 1(2), 137–143. <https://s.id/JISSiwirabuda>
- Patappari, A. (2021). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah pada BNI Syariah Soppeng. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknik ...*, 4(April), 1–9. <https://journal.jisti.unipol.ac.id/index.php/jisti/article/view/72%0Ahttps://journal.jisti.unipol.ac.id/index.php/jisti/article/download/72/63>
- Patappari, A. (2024). Sistem Penunjang Keputusan Seleksi Penerima Bantuan Langsung Tunai Menggunakan Metode Weighted Product. *Jurnal RISTER: Riset Sistem Cerdas*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.25126/Rister>
- Patappari, A., & Aksa, Andi Nurul, H. (2024). Sistem Pendukung Keputusan Identifikasi Penyakit Ayam Broiler. *Jurnal RISTER: Riset Sistem Cerdas*, 1(2), 48–55. <https://doi.org/10.25126/Rister>
- Rohmah, S. N. (2022). Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 559–572.
- Tahir, M. A. (2021). Pengembangan Sistem Informasi Transaksi Nasabah Pada Bank Sampah Kelurahan Lemba Kabupaten Soppeng Menggunakan Metode System Development Life Cycle. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknik Informatika "JISTI,"* 4(2), 31–38. <https://journal.jisti.unipol.ac.id/index.php/jisti/article/view/91>